

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan pada tahun 2014-2019. Data ini diperoleh di Otoritas Jasa Keuangan (<https://www.ojk.go.id>), Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id>), Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>), dan website masing-masing Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode *purposive sampling* peneliti memperoleh kriteria sampel yang digunakan yaitu 12 sampel. Berikut 12 profil perusahaan yang menjadi sampel penelitian:

##### **1. PT Bank BCA Syariah**

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Berpusat di gedung BCA Syariah Jl. Jatinegara Timur no.72 Jakarta Timur 13310.

##### **2. PT Bank BNI Syariah**

BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010. Berpusat di gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6 Jakarta 12950, Indonesia.

### **3. PT Bank BRI Syariah Tbk**

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah. Berpusat di Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat 10160.

### **4. PT Bank Jabar Banten Syariah**

Bank bjb syariah Secara resmi berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317. AH.01.01. tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Berpusat di Jl. Braga No. 135 Bandung 40117.

### **5. PT Bank Net Indonesia Syariah**

PT Bank Maybank Indocorp yang merupakan bank umum konvensional berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/ KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Pada tanggal 15 Mei 2019 Malayan Banking Berhad (“Maybank”) dan PT Prosperindo (“Properindo”) selaku Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“MSI”) telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (Agreement for the Sale and Purchase of Shares) dengan PT NTI Global Indonesia (“NTI”) dan PT Berkah Anugerah Abadi (“BAA”) untuk rencana penjualan dan pengalihan seluruh

kepemilikan saham Maybank dan Prosperindo dalam PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“MSI”) kepada NTI dan BAA (“Peralihan Saham”). Sejalan dengan persetujuan akuisisi tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-113/PB.1/2019 tanggal 20 Desember 2019 (terlampir), OJK telah menyetujui perubahan nama MSI melalui Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Net Indonesia Syariah. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2020 PT Bank Maybank Syariah Indonesia resmi berubah nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah. Berpusat di gedung Sona Topas Tower, 1st - 3rd Floor Jl Jendral Sudirman, Kav. 26 Jakarta 12920-Indonesia.

#### **6. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berpusat di Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940.

#### **7. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk**

Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi Panin Dubai Syariah Bank sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali Panin

Dubai Syariah Bank. Perubahan nama tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Keputusan No. AHU-0008935.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016. Izin usaha dengan nama baru, yaitu Panin Dubai Syariah Bank telah diperoleh dari OJK, sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk berpusat di gedung Gedung Panin Life Center Lt. 3, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91, Jakarta 11420.

#### **8. PT Bank Syariah Bukopin**

Perseroan memiliki legalitas yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/ DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin. SK Gubernur BI tersebut diterbitkan setelah Perseroan diakuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. Perseroan secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008. Saat itu, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. berpusat di Jl. Salemba Raya No. 55, Salemba, Jakarta Pusat 10440.

#### **9. PT Bank Syariah Mandiri**

PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut “Mandiri Syariah” atau “Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390. PT Bank Syariah Mandiri berpusat di Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340.

#### **10. PT Bank Mega Syariah**

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. PT Bank Mega Syariah berpusat di menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950.

#### **11. PT Bank Victoria Syariah**

PT Bank Victoria Syariah yang sebelumnya adalah PT. Bank Swaguna sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan Nomor 31425.

## **12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik. berpusat di menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Hasil Perhitungan Variabel Penelitian**

Hasil perhitungan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan telah dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Hasil Perhitungan Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu risiko kredit. Alat ukur yang digunakan yaitu *Non Performing Financing* (NPF) sebagai berikut:

##### **a. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) (Y)**

Merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur (pihak yang menerima pembiayaan).

**Tabel 4.1**  
**Hasil Perhitungan NPF tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	NPF						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,0010	0,0070	0,0050	0,0030	0,0040	0,0060	0,0040
2	BBNIS	0,0190	0,0250	0,0290	0,0290	0,0290	0,0330	0,0280
3	BBRIS	0,0460	0,0490	0,0460	0,0640	0,0540	0,0520	0,0520
4	BNIS	0,0500	0,0440	0,0350	0,0000	0,0000	0,0000	0,0220
5	BMI	0,0655	0,0710	0,0380	0,0440	0,0390	0,0520	0,0520
6	BPDS	0,0053	0,0260	0,0230	0,0130	0,0480	0,0380	0,0260
7	BBS	0,0407	0,0300	0,0760	0,0790	0,0570	0,0590	0,0570
8	BSM	0,0684	0,0610	0,0490	0,0450	0,0330	0,0240	0,0470
9	BMS	0,0389	0,0300	0,0430	0,0300	0,0220	0,0170	0,0310
10	BVS	0,0710	0,0980	0,0720	0,0460	0,0400	0,0390	0,0610
11	BTPNS	0,0129	0,0130	0,0150	0,0170	0,0140	0,0140	0,0140
12	BJBS	0,0584	0,0690	0,0180	0,0220	0,0460	0,0350	0,0420
<b>MAX</b>								0,0610
<b>MIN</b>								0,0040

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BVS atau PT. Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 0,980 atau 9,8% pada tahun 2015. Hasil ini merupakan pencapaian yang buruk karena bank tersebut menghasilkan nilai NPF yang sangat besar. bank yang dikatakan memiliki kredit bermasalah memiliki standar nilai NPF 5% (Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004). Dari standar nilai *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BVS atau PT. Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 0,0611 atau 6,11% sedangkan bank yang memiliki rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) terendah pada tahun 2014 – 2019 adalah BBCAS atau PT Bank BCA Syariah yaitu sebesar 0,0043 atau 0,43%. Rasio ini untuk mengukur antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh

bank. Semakin tingginya pembiayaan dari bank yang disalurkan kepada masyarakat, semakin besar juga peluang terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan masuk dalam kolektabilitas 5 (macet), maka akan berdampak berkurangnya sebagian besar pendapatan bank.

#### 4.2.1.2 Hasil Perhitungan Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas pembiayaan, modal bank, ukuran bank, pendapatan bersih bagi hasil, *Gross Domestic Product* (GDP), dan Inflasi.

##### a. Perhitungan kualitas pembiayaan (X1)

**Tabel 4.2**  
**Hasil Perhitungan LLP tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	LLP						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,0064	0,0118	0,0142	0,0154	0,0118	0,0181	0,0130
2	BBNIS	0,0070	0,0157	0,0199	0,0170	0,0195	0,0215	0,0168
3	BBRIS	0,0054	0,0152	0,0179	0,0183	0,0101	0,0173	0,0140
4	BNIS	0,0067	0,2957	0,2873	0,0124	0,0055	0,0004	0,1013
5	BMI	0,0063	0,0189	0,0265	0,0193	0,0174	0,0098	0,0164
6	BPDS	0,0092	0,0131	0,0091	0,0474	0,0314	0,0238	0,0223
7	BBS	0,0076	-0,0122	-0,0122	0,0184	0,0350	0,0371	0,0123
8	BSM	0,0060	0,0284	0,0254	0,0223	0,0229	0,0177	0,0204
9	BMS	0,0066	0,0211	0,0081	0,0041	0,0045	0,0054	0,0083
10	BVS	0,0056	-0,0241	0,0236	0,0087	0,0078	0,0086	0,0050
11	BTPNS	0,0067	0,0119	0,0157	0,0172	0,0179	0,0190	0,0148
12	BJBS	0,0047	0,0228	0,0979	0,1381	0,0213	0,0172	0,0503
<b>MAX</b>								0,1013
<b>MIN</b>								0,0050

Sumber: data diolah, 2021

Variabel kualitas pembiayaan diukur menggunakan rasio *Loan Loss Provision* (LLP). *Loan Loss Provision* (LLP) merupakan Rasio yang



mengukur seberapa besar kemampuan total aset dalam melakukan penyisihan kerugian kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai *Loan Loss Provision* (LLP) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BJBS atau PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk yaitu sebesar 0,0979 atau 9,79% pada tahun 2016. Namun, semakin tinggi hasil rasio ini maka pencadangan atas kerugian dibentuk oleh bank. semakin kecil pula kapasitas bank dalam menyalurkan kredit. Kapasitas penyaluran kredit yang lebih rendah akan menghilangkan kesempatan bank memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan yang memiliki rata-rata *Loan Loss Provision* (LLP) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BNIS atau PT. Bank Net Indonesia Syariah. yaitu sebesar 0,1013 atau 10,13% dan Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata *Loan Loss Provision* (LLP) terendah pada tahun 2014 – 2019 adalah BVS atau PT. Bank Victoria Syariah. yaitu sebesar 0,0050 atau 0,50%. Perhitungan *Loan Loss Provision* (LLP) atau CKPN lebih kompleks, tetapi dengan adanya pengecekan kredit tersebut secara satu per satu, maka pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah. Pasalnya, apabila terjadi impairment (penurunan), bank akan mencari jalan keluar agar kredit debitur tersebut tidak sampai merugikan bank. Oleh karena itu. dengan adanya perhitungan pembentukan atau penyisihan dana kredit berdasarkan perhitungan CKPN ini, setidaknya bank dapat mengurangi terjadinya risiko kredit yang akan dialaminya.

**b. Modal bank (X2)**

Variabel modal bank di ukur menggunakan rasio *Capital Buffer* (CAP) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Buffer* (CAP)

adalah rasio yang menunjukkan jumlah ekuitas terhadap total asset perusahaan.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan CAP tahun 2014 -2019**

NO	NAMA BANK	CAP						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,4181	0,2429	0,2204	0,1935	0,1787	0,2691	0,2538
2	BBNIS	0,1000	0,0944	0,0878	0,1095	0,1031	0,0969	0,0986
3	BBRIS	0,0844	0,0962	0,0907	0,0826	0,1327	0,1180	0,1008
4	BNIS	0,4249	0,4939	0,4461	0,5365	0,7594	0,8304	0,5819
5	BMI	0,0641	0,0718	0,0659	0,0874	0,0693	0,0785	0,0728
6	BPDS	0,1719	0,1618	0,1360	0,0466	0,1901	0,1513	0,1429
7	BBS	0,0979	0,1095	0,1166	0,1376	0,1406	0,1317	0,1223
8	BSM	0,0737	0,0822	0,0811	0,0832	0,0815	0,0823	0,0807
9	BMS	0,1127	0,1540	0,1789	0,1665	0,1619	0,1606	0,1557
10	BVS	0,1029	0,1270	0,1165	0,1501	0,1365	0,1581	0,1318
11	BTPNS	0,2243	0,2230	0,2185	0,2462	0,3320	0,3509	0,2658
12	BJBS	0,1049	0,1622	0,1178	0,1073	0,1263	0,1141	0,1221
<b>MAX</b>								0,5819
<b>MIN</b>								0,0728

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai *Capital Buffer* (CAP) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BNIS atau PT. Bank Net Indonesia Syariah, yaitu sebesar 0,8304 atau 83,04% pada tahun 2019. Hasil ini merupakan pencapaian yang baik karena bank tersebut menghasilkan nilai *Capital Buffer* (CAP) yang sangat tinggi, dimana menunjukkan bahwa Semakin tinggi proporsi modal sendiri maka semakin tinggi pula keterikatan atau motivasi pemilik atas kelangsungan usaha banknya, sehingga akan semakin tinggi peranan pemilik dalam mempengaruhi manajemen peningkatan kinerja atau efisiensi banknya secara lebih profesional. Dari standar nilai *Capital Buffer* (CAP) Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata

*Capital Buffer (CAP)* tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BNIS atau PT. Bank Net Indonesia Syariah. yaitu sebesar 0,5819 atau 58,19% sedangkan bank yang memiliki rata-rata *Capital Buffer (CAP)* terendah pada tahun 2014 – 2019 adalah BMI atau PT Bank Muamalat Indonesia, yaitu sebesar 0,0728 atau 7,28%. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan bahwa bank tersebut menunjukkan tersedianya modal untuk menjaga likuiditas (*protective function*) dan kelangsungan operasionalnya sehingga dapat melindungi para pemilik modal dari kepailitan atau kebangkrutan.

Alat ukur modal bank yang kedua yaitu *Capital Eduquaty Ratio (CAR)*. *Capital Eduquaty Ratio (CAR)* Merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Perhitungan CAR tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	CAR						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,2960	0,3430	0,3670	0,2940	0,2430	0,3830	0,3210
2	BBNIS	0,1626	0,1548	0,1492	0,2014	0,1931	0,1888	0,1750
3	BBRIS	0,1289	0,1394	0,2063	0,2005	0,2973	0,2526	0,2042
4	BNIS	0,5213	0,3840	0,5506	0,7583	0,1631	0,2418	0,4365
5	BMI	0,1391	0,1200	0,1274	0,1362	0,1234	0,1242	0,1284
6	BPDS	0,2569	0,2030	0,1817	0,1151	0,2315	0,1446	0,1888
7	BBS	0,1480	0,1631	0,1515	0,1920	0,1931	0,1525	0,1667
8	BSM	0,1412	0,1285	0,1401	0,1589	0,1626	0,1615	0,1488
9	BMS	0,1882	0,1874	0,2353	0,2219	0,2054	0,1996	0,2063
10	BVS	0,1527	0,1614	0,1598	0,1929	0,2207	0,1944	0,1803
11	BTPNS	0,3388	0,1993	0,2380	0,2890	0,4090	0,4460	0,3200
12	BJBS	0,1578	0,1621	0,1843	0,1877	0,1863	0,1771	0,1759
<b>MAX</b>								0,4365
<b>MIN</b>								0,1284

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BNIS atau PT. Bank Net Indonesia Syariah, yaitu sebesar 0,7583 atau 75,83% pada tahun 2017. Hasil ini merupakan pencapaian yang baik karena bank tersebut mampu menghasilkan nilai *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) yang sangat tinggi dari standar *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) yaitu minimal 8% (Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004) karena semakin tinggi *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko karena mampu menghasilkan modal yang tinggi. Dari standar nilai *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) yang memiliki rata-rata *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BNIS atau PT. Bank Net Indonesia Syariah, yaitu sebesar 0,4365 atau 43,65% sedangkan bank yang memiliki rata-rata *Capital Eduquaty Ratio* (CAR) terendah pada tahun 2014 – 2019 adalah BMI atau PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu sebesar 0,1284 atau 12,84%.

**c. Ukuran Bank (X3)**

Variabel Ukuran Bank yang di ukur menggunakan  $Ln$  (*Asset*) merupakan suatu skala mengenai besar kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat dari total aktiva, log size, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva Barus dan Erick (2016).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Perhitungan SIZE tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	SIZE						Rata- rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	14,9125	15,2865	15,4243	15,5992	15,7709	15,9706	15,6103
2	BBNIS	16,7855	16,9508	17,1589	17,3659	17,5304	17,7266	17,3465
3	BBRIS	16,8289	17,0035	17,1367	17,2670	17,4657	17,5793	17,2904
4	BNIS	14,7173	14,3216	14,1304	14,1619	13,4046	13,4813	13,9000
5	BMI	17,9491	17,8725	17,8382	17,9392	17,8634	17,7357	17,8498
6	BPDS	15,6395	15,7806	15,986	15,9858	15,9871	16,2249	15,9929
7	BBS	15,4571	15,5785	15,7666	15,8017	15,6629	15,7238	15,7067
8	BSM	18,0193	18,0754	18,1828	18,2922	18,4064	18,5367	18,2987
9	BMS	15,7681	15,5319	15,6347	15,7633	15,8079	15,8978	15,7271
10	BVS	14,1903	14,1492	14,2988	14,5112	14,5701	14,6348	14,4328
11	BTPNS	15,1259	15,4633	15,7955	16,0300	16,3037	16,5480	16,0281
12	BJBS	15,6223	15,6788	15,8226	15,8585	15,7238	15,8621	15,7892
<b>MAX</b>								18,2987
<b>MIN</b>								13,9000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai *SIZE* tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BSM atau PT Bank Syariah Mandiri, yaitu sebesar 18,5367 pada tahun 2019. Hasil ini merupakan pencapaian yang baik karena semakin besar total asset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar asset maka semakin banyak modal yang ditanamkan. Dari standar nilai *SIZE* Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata *SIZE* tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BSM atau PT Bank Syariah Mandiri, yaitu sebesar 18,2987 sedangkan bank yang memiliki rata-rata *SIZE* terendah

pada tahun 2014 – 2019 adalah BNIS atau PT Bank Net Indonesia Syariah, yaitu sebesar 13,9000. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen karena perusahaan yang besar cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang lebih kecil karena jumlah assetnya cenderung besar.

**d. Pendapatan Bersih Bagi Hasil (X4)**

Variabel pendapatan bersih bagi hasil di ukur dengan rumus *Net Profit Share Income* (NPSI). Rasio ini membandingkan pendapatan bersih bagi hasil dengan total aset (Incekara & Çetinkaya, 2019).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Perhitungan NPSI tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	NPSI						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,0431	0,0713	0,0740	0,0399	0,0367	0,0313	0,0494
2	BBNIS	0,0346	0,0367	0,0318	0,0277	0,0244	0,0194	0,0291
3	BBRIS	0,0469	0,0402	0,0347	0,0359	0,0297	0,0250	0,0354
4	BNIS	0,0112	0,0202	0,0213	0,0099	0,0064	0,0001	0,0115
5	BMI	0,0537	0,0481	0,0410	0,0391	0,0375	0,0423	0,0436
6	BPDS	0,0434	0,0527	0,0395	0,0496	0,0419	0,0454	0,0454
7	BBS	0,0631	-0,0614	-0,0550	0,0500	0,0466	0,0476	0,0152
8	BSM	0,0364	0,0343	0,0294	0,0286	0,0267	0,0265	0,0303
9	BMS	0,0324	0,1034	0,0697	0,0860	0,1106	0,1095	0,0853
10	BVS	0,0713	-0,2121	0,0511	0,0499	0,0509	0,0520	0,0105
11	BTPNS	0,0283	0,0475	0,0391	0,0371	0,0299	0,0338	0,0360
12	BJBS	0,0569	0,1304	0,1027	0,1074	0,0451	0,0412	0,0806
<b>MAX</b>								0,0853
<b>MIN</b>								0,0105

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai *Net Profit Share Income* (NPSI) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BSM atau PT Bank Syariah Mandiri, yaitu sebesar 0,1304 atau 13,04% pada tahun 2015. Hasil ini merupakan pencapaian yang baik karena semakin besar nilai *Net Profit Share Income* (NPSI) maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Dari standar nilai *Net Profit Share Income* (NPSI) Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata *Net Profit Share Income* (NPSI) tertinggi pada tahun 2014 – 2019 adalah BMS atau PT Bank Mega Syariah, yaitu sebesar 0,0853 atau 8,53%. Sedangkan bank yang memiliki rata-rata *Net Profit Share Income* (NPSI) terendah pada tahun 2014 – 2019 adalah BVS atau PT Bank Victoria Syariah. yaitu sebesar 0,0105 atau 1,05%.

**e. Gross Domestic Product (GDP) (X5)**

**Tabel 4.7**  
**GDP tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	GDP						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
2	BBNIS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
3	BBRIS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
4	BNIS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
5	BMI	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
6	BPDS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
7	BBS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
8	BSM	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
9	BMS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
10	BVS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
11	BTPNS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
12	BJBS	0,0507	0,0506	0,0503	0,0507	0,0517	0,0502	0,0507
<b>MAX</b>								0,0507
<b>MIN</b>								0,0507

Sumber: data diolah, 2021

*Gross domestic product* (GDP) digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu (Firdaus, 2016). Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa *Gross domestic product* (GDP) tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,0517 atau 5,17%. Sedangkan *Gross domestic product* (GDP) terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0502 atau 5,02%. Data tersebut menyatakan bahwa ketika *Gross domestic product* (GDP) meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, jumlah barang dan jasa yang diproduksi untuk sebuah pasar juga meningkat begitu pula sebaliknya. Dari standar nilai *Gross domestic product* (GDP) pada tahun 2014 – 2019 yang memiliki rata-rata sebesar 0,0507 atau 5,07%.

#### f. Inflasi (X6)

**Tabel 4.8**  
**Inflasi tahun 2014 – 2019**

NO	NAMA BANK	Inflasi						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	BBCAS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
2	BBNIS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
3	BBRIS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
4	BNIS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
5	BMI	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
6	BPDS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
7	BBS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
8	BSM	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
9	BMS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
10	BVS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
11	BTPNS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
12	BJBS	0,0836	0,0335	0,0358	0,0361	0,0313	0,0272	0,0413
<b>MAX</b>								0,0413
<b>MIN</b>								0,0413

Sumber: data diolah, 2021



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,0836 atau 8,36%. Sedangkan Inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0272 atau 2,72%. Dari standar nilai Inflasi pada tahun 2014 – 2019 yang memiliki rata-rata sebesar 0,0413 atau 4,13%. Inflasi dapat mempengaruhi sektor perbankan karena perubahan harga pada masyarakat akan mendorong masyarakat akan kesulitan dalam pembayaran pinjaman terhadap perbankan, hal ini mengakibatkan dapat meningkatnya NPF atau risiko kredit.

#### 4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistika deskriptif dilakukan dengan program *Eviews 9*.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	72	0,000000	0,098000	0,036097	0,022378
LLP	72	-0,024100	0,295700	0,025054	0,049706
CAP	72	0,046600	0,830400	0,177938	0,147117
CAR	72	0,115100	0,758300	0,216601	0,108674
SIZE	72	13,40500	18,53700	16,15800	1,290804
NPSI	72	-0,212100	0,130400	0,039354	0,042660
GDP	72	0,050000	0,052000	0,050833	0,000692
INFLASI	72	0,027000	0,084000	0,041333	0,019472

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menyajikan hasil dari statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi

dapat dilihat bahwa sampel penelitian ini yaitu 12 perusahaan selama 6 periode, sehingga diperoleh 72 data yang menjadi sampel penelitian dan dapat dilakukan observasi. Berdasarkan data diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut.

1. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *Non Performing Financing* (NPF) (Y) memperoleh nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maximum 0,0980. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,036097 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasi 0,022378. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan pencapaian yang buruk, karena bank tersebut menghasilkan nilai NPF yang sangat besar, bank yang dikatakan memiliki kredit bermasalah memiliki standar nilai NPF 5% (Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004).
2. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *Loan Loss Provision* (LLP) (X1) memperoleh nilai minimum sebesar -0,0241 dan nilai maximum 0,2957. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,025054 yaitu lebih kecil dari nilai standar deviasi 0,049706. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen (X1) mencerminkan hasil yang kurang baik, karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia sebagai bank sentral mengharuskan bank untuk membentuk Loan Loss Provisions (LLP) sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari total aset produktif yang tergolong lancar seperti tertuang pada PBI no 13/26/PBI/2011 tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
3. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *Capital Buffer* (CAP) (X2) memperoleh nilai minimum sebesar 0,0466 dan nilai maximum 0,8304. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,177938 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasi 0,147117. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen (X2) ini baik,

karena bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan yakni *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap (Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /Pbi/2013).

4. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X3) memperoleh nilai minimum sebesar 0,1151 dan nilai maximum 0,7583. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,216601 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasi 0,108674. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen ini kurang baik, karena menurut peraturan bank indonesia penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah yakni 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu) (Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /Pbi/2013).
5. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *SIZE* (X4) memperoleh nilai minimum sebesar 13,4050 dan nilai maximum 18,5370. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 16,15800 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasi 1,290804. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen (X4) ini baik, karena nilai mean yang dimiliki lebih besar dari nilai penyimpangannya.
6. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *Net Profit Share Income* (NPSI) (X5) memperoleh nilai minimum sebesar -0,2121 dan nilai maximum 0,1304. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,039354 yaitu lebih kecil dari nilai standar deviasi 0,042660. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen (X5) mencerminkan hasil yang kurang baik, karena nilai mean yang dimiliki lebih kecil dari nilai penyimpangannya.

sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.

7. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk *Gross Domestic Product* (GDP) (X6) memperoleh nilai minimum sebesar 0,0500 dan nilai maximum 0,0520. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,041333 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasi 0,000692. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen (X6) ini baik, karena nilai mean yang dimiliki lebih besar dari nilai penyimpangannya.
8. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk Inflasi (X7) memperoleh nilai minimum sebesar 0,0270 dan nilai maximum 0,0840. Sedangkan nilai mean yang didapat sebesar 0,412500 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasi 0,019472. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen (X7) ini baik, karena nilai mean yang dimiliki lebih besar dari nilai penyimpangannya.

### 4.2.3 Hasil Uji Prasyarat Data

#### 4.2.3.1 Uji Chow

Menurut Wahyu, (2007) Uji *Chow* digunakan untuk memilih metode estimasi terbaik antara metode *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Chow* dengan probabilitas 0,05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* sebagai berikut:

Ho: Model *Common Effect* atau *Pooled Least Square*

Ha: Model *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas untuk *cross-section F* pada uji regresi dengan pendekatan *Fixed effect* lebih dari 0,05 (tingkat signifikansi atau  $\alpha = 5\%$ ) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *Common Effect* atau *Pooled Least Square*,

tetapi jika nilainya kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d,f,	Prob,
Cross-section F	4,454168	(11,53)	0,0001
Cross-section Chi-square	47,134091	11	0,0000

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil Uji *Chow* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0001 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05 ( $0,05 > 0,0000$ ) sehingga  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Artinya dalam penelitian ini model estimasi *Common Effect* atau *Pooled Least Square*. lebih baik dibandingkan dengan *Fixed Effect* setelah mengetahui bahwa metode *Common Effect* atau *Pooled Least Square* lebih baik daripada metode *Fixed Effect* selanjutnya perlu dilakukan Uji *Langerange Multiple*.

#### 4.2.3.2 Uji Langrange Multiple

Menurut Wahyu, (2007) pengujian ini untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *pooled least square* dapat dilakukan dengan *The Breusch-Pagan LM Test* dimana menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Common Effect* atau *Pooled Least Square*

$H_a$ : Model *Random Effect*

Dasar penolakan  $H_0$  menggunakan statistic LM Test yang berdasarkan distribusi *Chi-square*, Jika LM statistic lebih besar dari *Chi-square tabel* ( $p\text{-value} > \alpha$ ) maka tolak  $H_0$ , sehingga model yang lebih sesuai dalam

menjelaskan permodelan data panel tersebut adalah *random effect model*, begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Langrange Multiple**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	18,06270	2,712104	20,77480
	(0,0000)	(0,0996)	(0,0000)

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 Hasil Uji Langrange Multiple pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Prob. < Chi2 sebesar 0,0000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho diterima. Artinya dalam penelitian ini model estimasi yang lebih tepat digunakan adalah *Common Effect* atau *Pooled Least Square* dari pada *Random Effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow Uji Langrange Multiple, maka metode yang paling tepat digunakan dalam model penelitian ini adalah metode *Common Effect* atau *Pooled Least Square*.

#### 4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

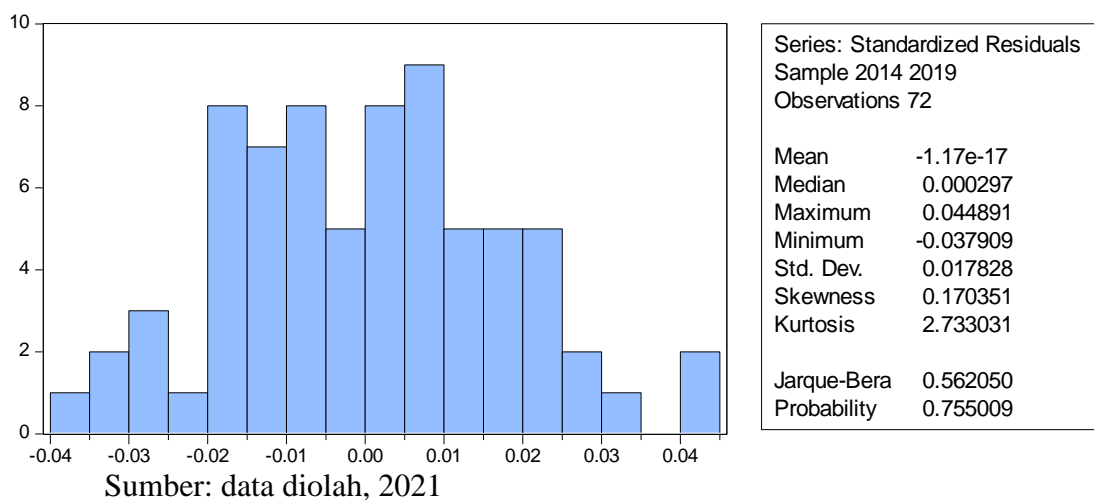
##### 4.2.4.1 Uji Normalitas

Menurut Wahyu, (2007) Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pengujian normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat normal tidaknya data yang dianalisis.

Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* (uji JB). Uji JB merupakan uji normalitas berdasarkan pada koefisien keruncingan (*kurtosis*) dan koefisien kemiringan (*skewness*). Dalam uji JB normalitas dapat dilihat dari besaran nilai *probability JB* sebagai berikut:

Jika nilai *probability* JB > 0.05 maka data berdistribusi normal

Jika nilai *probability* < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal.



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa nilai *probability* sebesar 0,755009. Karena nilai prob. 0,755009 > 0.05 maka data berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi berdistribusi normal dalam model terpenuhi.

#### 4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Wahyu, (2007) uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi yang dilakukan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai korelasi antar dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinieritas, begitu juga sebaliknya.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	LLP	CAP	CAR	SIZE	NPSI	GDP	INFLASI
LLP	1,000000	0,243741	0,325875	-0,180168	0,130103	-0,098129	-0,140766
CAP	0,243741	1,000000	0,591203	-0,629032	-0,141629	0,012956	-0,060342
CAR	0,325875	0,591203	1,000000	-0,439716	-0,065566	0,010810	0,025915
SIZE	-0,180168	-0,629032	-0,439716	1,000000	0,101724	-0,011148	-0,019876
NPSI	0,130103	-0,141629	-0,065566	0,101724	1,000000	0,002505	0,043896
GDP	-0,098129	0,012956	0,010810	-0,011148	0,002505	1,000000	0,117069
INFLASI	-0,140766	-0,060342	0,025915	-0,019876	0,043896	0,117069	1,000000

Sumber: data diolah, 2021

Dari tabel 4.12 diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8 ( $r < 0,8$ ) yang berarti model tidak mengandung masalah multikolinieritas atau asumsi tidak terjadi multikolinieritas dalam model terpenuhi.

#### 4.2.4.3 Uji Autokorelasi

Menurut Wahyu, (2007) uji autokorelasi dalam model regresi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk menguji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas ( $dU$ ) dan nilai batas bawah ( $dL$ ), dengan ketentuan sebagai berikut:

- $dW > dU$ , tidak terdapat autokorelasi positif
- $dL < dW < dU$ , tidak dapat disimpulkan
- $dW < 4 - dU$ , tidak terjadi autokorelasi
- $4 - dU < 4 - dL$ , tidak dapat disimpulkan
- $dW > 4 - dL$ , ada autokorelasi negative



**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<i>Durbin Watson</i> <b>(DW)</b>	<i>Durbin Lower</i> <b>(DL)</b>	<i>Durbin Upper</i> <b>(DU)</b>
1,027962	1,027962	1,76881

Sumber: data diolah, 2021

Dari hasil pengujian *Durbin-Watson* pada tabel 4.13 diatas diperoleh nilai DW 1,027962 dengan nilai tabel menggunakan signifikan 0,05 atau 5%. Jumlah sampel ( $n=72$ ) dan jumlah variabel independen ( $K=6$ ). Sehingga dapat diperoleh nilai dL 1,47317 dan nilai dU 1,76881. Dapat disimpulkan nilai DW sebesar 1,027962 lebih kecil dari nilai dU sebesar  $4-1,76881 = 2,19813$  yang artinya bahwa  $dW < 4- dU$  atau  $1,010317 < 2,23119$ . Dengan demikian bahwa tidak terjadi autokorelasi yang bersifat positif mendukung terhindarnya autokorelasi pada model yang digunakan dengan penelitian ini.

#### 4.2.4.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan *me-regress* model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  (taraf signifikan atau  $\alpha = 0.05$ ) maka terjadi heteroskedastisitas, jika sebaliknya nilai probabilitas  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,033371	0,094094	0,354658	0,7240
LLP	-0,007787	0,027242	-0,285857	0,7759
CAP	-0,021103	0,012266	-1,720411	0,0902
CAR	0,005333	0,014663	0,363683	0,7173
SIZE	-0,001832	0,001243	-1,473991	0,1454
NPSI	0,000321	0,029790	0,010777	0,9914
GDP	0,175936	1,807162	0,097355	0,9227
INFLASI	0,106737	0,065175	1,637699	0,1064

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 hasil regresi dari seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih besar dari 0,05 ( $p\ value > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa model asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4.2.5 Hasil Uji Analisis Data

### 4.2.5.1 Model Regresi Data Panel

Model regresi menggunakan data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Setelah melakukan pemilihan model terbaik dan uji asumsi klasik maka diperoleh hasil estimasi model terbaik sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Common Effect Model**

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,070755	0,169621	0,417136	0,6780
LLP *	0,088738	0,049108	1,807007	0,0755
CAP ***	-0,077013	0,022112	-3,482903	0,0009
CAR *	-0,045464	0,026433	-1,719953	0,0903
SIZE	-0,002407	0,002240	-1,074376	0,2867
NPSI ***	-0,174302	0,053701	-3,245762	0,0019
GDP	0,543321	3,257723	0,166779	0,8681
INFLASI	0,116156	0,117489	0,988656	0,3266
R-squared	0,365300	Mean dependent var		0,036097
Adjusted R-squared	0,295880	S,D, dependent var		0,022378
S,E, of regression	0,018778	Akaike info criterion		-5,007807
Sum squared resid	0,022568	Schwarz criterion		-4,754844
Log likelihood	188,2811	Hannan-Quinn criter,		-4,907102
F-statistic	5,262148	Durbin-Watson stat		1,027962

Keterangan: \*\*\* ≤ sig 0,01, \*\* ≤ sig 0,05, \* ≤ sig 0,1

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh hasil persamaan model sebagai berikut:

$$Y = 0,070755 + 0,088738X_1 - 0,077013X_2 - 0,045464X_3 - 0,002407X_4 - 0,174302X_5 + 0,543321X_6 + 0,116156X_7 + e$$

Keterangan:

Y	=	NPF
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$	=	Koefisien Regresi
X1	=	Loan Loss Provision (LLP)
X2	=	Capital Buffer (CAP)
X3	=	Capital Adequacy Ratio (CAR)
X4	=	Size
X5	=	Net Profit Share Income (NPSI)
X6	=	Gross Domestic Product (GDP)
X7	=	Inflasi
e	=	error

Dari hasil persamaan tersebut dapat dilihat hasil sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 0,070755 menunjukkan bahwa *Loan Loss Provision* (LLP), *Capital Buffer* (CAP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Size*, *Net Profit Share Income* (NPSI), *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi diasumsikan tetap atau sama dengan 0, maka nilai *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebesar 0,070755.
2. Koefisien *Loan Loss Provision* (LLP) sebesar 0,088738 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel *Loan Loss Provision* (LLP) menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat sebesar 0,088738 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Koefisien *Capital Buffer* (CAP) sebesar -0,077013 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel *Capital Buffer* (CAP) menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) menurun sebesar -0,077013 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Koefisien *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar -0,045464 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) menurun sebesar -0,045464 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
5. Koefisien *SIZE* sebesar -0,002407 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan Variabel *SIZE* menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) menurun sebesar -0,002407 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
6. Koefisien *Net Profit Share Income* (NPSI) sebesar -0,174302 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel *Net Profit Share Income* (NPSI) menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) menurun sebesar -0,174302 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
7. Koefisien *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 0,543321 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel *Gross Domestic Product* (GDP) menyebabkan *Non Performing Financing*

(NPF) meningkat sebesar 0,543321 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

8. Koefisien Inflasi sebesar 0,116156 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variabel Inflasi menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat sebesar 0,116156 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

#### 4.2.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

**Tabel 4.16**

**Tabel Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Weighted Statistics	
R-squared	0,365300

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil bahwa Faktor Spesifik Bank dan Makroekonomi (Selain *Loan Loss Provision* (LLP), *Capital Buffer* (CAP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Size*, *Net Profit Share Income* (NPSI), *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi) dapat dijelaskan oleh variabel dependen Risiko Kredit (NPF) sebesar 36,5% dan selebihnya 63,5% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai adjusted R Square yang kecil dikarenakan adanya faktor faktor lain yang ikut mempengaruhi variabel risiko kredit. Karena dalam praktiknya faktor dari pihak debitur turut mempengaruhi risiko kredit. Hasil dari variabel *Loan Loss Provision* (LLP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Size*, *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi yang tidak signifikan juga ikut membuat nilai dari adjusted R Square semakin kecil.

## 4.2.7 Hasil Uji Hipotesis

### 4.2.7.1 Uji Hipotesis Statistik (Uji Parsial t)

Menurut Wahyu, (2007) uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing–masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Adapun kesimpulan jika:

Ha diterima dan Ho ditolak apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $\text{sig} < 0,05$

Ha ditolak dan Ho diterima apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $\text{sig} > 0,05$ .

1. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,088738 dan nilai t hitung sebesar 1,807007  $>$  t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability* 0,0755  $>$  0,05. Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a1}$  ditolak dan menerima  $H_{o1}$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Loan Loss Provision* (LLP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar -0,077013 dan nilai t hitung sebesar -3,482903  $>$  t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability* 0,0009  $<$  0,05. Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a2}$  diterima dan menolak  $H_{o2}$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *Capital Buffer* (CAP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
3. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar -0,045464 dan nilai t hitung sebesar -1,719953  $>$  t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability* 0,0903  $>$  0,05. Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a3}$  ditolak dan menerima  $H_{o3}$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
4. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar -0,002407 dan nilai t hitung sebesar -1,074376  $>$  t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability* 0,2867  $>$  0,05. Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a4}$  ditolak dan menerima  $H_{o4}$  yang

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Size* terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

5. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar  $-0,174302$  dan nilai t hitung sebesar  $-3,245762 > t$  tabel sebesar  $1,66827$  dengan nilai signifikansi *probability*  $0,0019 < 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a5}$  diterima dan menolak  $H_{o5}$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *Net Profit Share Income* (NPSI) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
6. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar  $0,543321$  dan nilai t hitung sebesar  $0,166779 < t$  tabel sebesar  $1,66827$  dengan nilai signifikansi *probability*  $0,8681 > 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a6}$  ditolak dan menerima  $H_{o6}$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
7. Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar  $0,116156$  dan nilai t hitung sebesar  $0,988656 < t$  tabel sebesar  $1,66827$  dengan nilai signifikansi *probability*  $0,3266 > 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a7}$  ditolak dan menerima  $H_{o7}$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

### 4.3 Hasil Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh kualitas pembiayaan terhadap risiko kredit

Berdasarkan hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas pembiayaan yang menggunakan proxy rasio *Loan Loss Provision* (LLP) terhadap risiko kredit yang menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar  $0,088738$  dan nilai t hitung sebesar  $1,807007 > t$  tabel sebesar  $1,66827$  dengan nilai signifikansi *probability*  $0,0755 > 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a1}$  ditolak dan menerima  $H_{o1}$  yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh LLP terhadap NPF. Hasil

penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waemustafa & Sukri, (2015) yang menyatakan bahwa rasio *Loan Loss Provision* (LLP) tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Hal ini disebabkan karena tingkat cadangan kerugian penurunan nilai yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah cukup rendah yang mengakibatkan saat rasio *Non Performing Financing* (NPF) kotor meningkat maka cadangan kerugian pinjaman tidak dapat sepenuhnya menutupi tingginya risiko kredit.

Bahkan Letza *et al.*, (2008) menjelaskan bahwa dalam teori keagenan prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer mempunyai kepentingan yang berbeda (Pugna & Duțescu, 2020), sehingga tindakan manajer yang ceroboh memulai, dan mendanai pinjaman yang berpotensi gagal sehingga memicu banyaknya kasus risiko kredit yang diekspresikan dalam kredit macet, yang mengidentifikasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat tertagih dan mengalami penurunan nilai saat tingginya kredit macet tunggakan dan segala bentuk restrukturisasi pinjaman yang membuat pembukuan pinjaman menjadi kotor sehingga tidak terpenuhinya cadangan kerugian penurunan nilai untuk menutupi risiko kredit yang meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Misman & Bhatti, (2020), Görmüş & Alkhawaja, (2019) dan Ginting & Haryanto, (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pembiayaan yang diproyeksi *Loan Loss Provision* (LLP) berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Artinya ketika bank membuat provisi kerugian yang lebih tinggi, pinjaman atau pembiayaan berkualitas rendah atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan eksposur risiko kredit. Boudriga *et al.*, (2009) menyebutkan bahwa manajer bank dapat menggunakan *Loan Loss Provision* (LLP) untuk mengukur kekuatan finansial bank mereka dan sebagai salah satu acuan bank menentukan sikap dalam pengendalian risiko perbankan. Boudriga *et al.*, (2009) juga menyatakan *Loan Loss Provision* (LLP) sebagai mekanisme



kendali atas pinjaman yang dianggap berpotensi bermasalah. Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa *Loan Loss Provision* (LLP) dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan risiko kredit perbankan.

#### 4.3.2 Pengaruh modal bank terhadap risiko kredit

- a. Berdasarkan hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara modal bank yang menggunakan proxy rasio *Capital Buffer* (CAP) terhadap risiko kredit yang menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,077013 dan nilai t hitung sebesar -3,482903 > t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability*  $0,0009 < 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a2}$  diterima dan menolak  $H_{o2}$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *Capital Buffer* (CAP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafay *et al.*, (2016) dan Casu & Clare, (n.d.) yang menemukan bahwa *Capital Buffer* (CAP) atau modal ekuitas berpengaruh terhadap risiko kredit. Sehingga hubungan negatif antara *Capital Buffer* dengan *Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan jika semakin besar jumlah ekuitas maka risiko kredit Bank Umum Syariah akan semakin menurun. Hasil negative ini menunjukkan bahwa hasil ini konsisten dengan prinsip Basel Accord untuk rasio kecukupan modal, yang menyatakan bahwa bank harus menjaga modal yang kuat dalam rangka untuk menyerap risiko kredit. Serta Zribi & Boujelbene, (2011) juga telah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa modal yang telah dikapitalisasi oleh bank akan mendapat risiko yang lebih rendah dari pada yang tidak dikapitalisasi.

Di sisi lain, hubungan negatif antara risiko dan permodalan bank memang terjadi. Teori keagenan dapat membenarkan pengambilan risiko tinggi, manajer mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi (Abbas & Younas, 2021). Jackson *et al.*, (1999) menyatakan bahwa *Capital Buffer* berarti menghemat sejumlah

modal lebih tinggi dari modal minimum yang dipersyaratkan regulator. Selain itu, bank menahan lebih banyak modal dari pada yang dibutuhkan untuk menunjukkan kesehatan dan untuk mendapatkan peringkat yang baik dari Lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Misman *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa modal bank yang diproxy kan *Capital Buffer* (CAP) berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Misman *et al.*, (2015) menjelaskan bahwa perbankan islam dengan modal ekuitas lebih cenderung memiliki risiko kredit lebih tinggi dari pada bank dengan ekuitas lebih sedikit. Ini menyiratkan bahwa bank dengan modal ekuitas yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam aktivitas pendanaan yang lebih berisiko karena mereka yakin memiliki cukup modal untuk menahan potensi kerugian.

- b. Berdasarkan hasil hipotesis ketiga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara modal bank yang menggunakan proxy rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap risiko kredit yang menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukan bahwa koefisien regresi sebesar -0,045464 dan nilai t hitung sebesar -1,719953 > t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability* 0,0903 > 0,05. Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a3}$  ditolak dan menerima  $H_{o3}$  bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil ini menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tidak berpengaruh terhadap NPF disebabkan baik peningkatan maupun penurunan NPF tidak terjadi karena pengaruh dari jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Khatimah *et al.*, 2020). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.*, (2020), Amelia, (2019), Khatimah *et al.*, (2020) dan Abyanta *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa potensi kerugian yang dialami oleh bank akan ditanggulangi sekiranya bank memiliki rasio

kecukupan modal yang baik. Kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) terjadi dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) hanya untuk menutupi potensi kerugian yang terjadi pada bank tersebut. Seberapapun besar nilai rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank tidak dapat menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karenanya, besarnya kecukupan modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk peminjam) terhadap kinerja bank yang berarti permodalan bank syariah yang diwakilkan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) harus mampu menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank termasuk risiko kerugian akibat terjadinya pembiayaan bermasalah dengan catatan sesuai *ceteris paribus* (Siregar *et al.*, 2020).

Berger & DeYoung, (1997) menyatakan bahwa dalam teori keagenan, bank dengan modal yang relatif rendah merespons insentif moral hazard dengan meningkatkan risiko portofolio pinjaman mereka, yang menghasilkan rata-rata NPF di masa depan. Dengan kata lain, bank akan meningkatkan penyaluran kredit tanpa mempertimbangkan kualitas kredit. Untuk mengimbangi modal yang rendah, manajer bank dapat meningkatkan pertumbuhan pinjaman dengan mengorbankan kualitas pinjaman (masa depan) (Berger & DeYoung, 1997). Kurangnya pengawasan oleh bank syariah, kurangnya fleksibilitas dalam merestrukturisasi kerugian pinjaman menggunakan agunan, dan risiko penarikan pemegang utang investasi seperti yang ditekankan oleh Abedifar *et al.*, (2013) dapat menjelaskan mengapa bank syariah menunjukkan risiko dan inefisiensi yang lebih tinggi. Risiko seperti itu selanjutnya dapat diperburuk ketika kapitalisasi bank syariah memperburuk konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer, terutama ketika manajer melakukan pengambilan risiko yang

berlebihan untuk mengimbangi peningkatan biaya modal seperti dalam (Basher *et al.*, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya İncekara & Çetinkaya, (2019) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Artinya semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (Ali, 2004).

#### **4.3.3 Pengaruh ukuran bank terhadap risiko kredit**

Berdasarkan hasil hipotesis keempat menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran bank yang menggunakan proxy *SIZE* terhadap risiko kredit yang menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,002407 dan nilai t hitung sebesar -1,074376 > t tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability* 0,2867 > 0,05. Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a4}$  ditolak dan menerima  $H_{o4}$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sintya Kumala & Santi Suryantini, (2015), Mahendra & Mahardika, (2019) dan Sparta, (2017). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Ukuran Bank terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Artinya bahwa bank besar ataupun kecil tidak dapat menyerap lebih banyak pengambilan aktivitas risiko kredit. Sehingga hasil penelitian ini membuktikan bahwa perubahan ukuran bank tidak dapat mengurangi risiko karena perubahan ukuran aset dalam rangka diversifikasi aset untuk tujuan pengurangan risiko bank tidak dapat tercapai (Damset *et al* dalam Agusman, (2006).

Dari perspektif teori keagenan, bank-bank besar memiliki lebih banyak sumber daya sehingga sulit untuk mengamati perilaku ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh agent (manajer) yang mengakibatkan mereka cenderung menghadapi pilihan yang merugikan saat berinvestasi, dalam sistem informasi seperti sistem penganggaran, prosedur pelaporan, dan lapisan manajemen tambahan. Selain itu, bank yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk memastikan kualitas pinjaman tetap baik serta bank yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan penjaminan, pemantauan dan pengendalian pinjaman, sehingga mengurangi masalah keagenan atau moral hazard. Bank yang lebih besar dapat memanfaatkan keterampilan personel, terutama dalam mengelola risiko kredit (Haryono *et al.*, 2016).

Sparta, (2017) dalam penelitiannya menyatakan selama 11 tahun periode penelitian yang dilakukan terhadap perbankan Indonesia mengindikasikan bahwa terjadi tren kenaikan aset bank secara rata-rata setiap tahun yang disebabkan membaiknya perekonomian Indonesia selama kurun waktu penelitian. Kedua, pertumbuhan aset dipicu juga dengan upaya penguatan sektor perbankan oleh Bank Indonesia melalui program restrukturisasi perbankan Indonesia. Namun demikian kenaikan aset bank setiap tahun tahun belum berdampak pada kenaikan risiko kredit perbankan dan hasil empirik cenderung menunjukkan risiko perbankan menurun. Kenaikan aset bank selama kurun waktu penelitian tersebut telah mampu menurunkan rata-rata risiko bank setiap tahunnya, namun hubungan ini secara empirik tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Astrini *et al.*, (2018) dan İncekara & Çetinkaya, (2019) yang menyatakan bahwa ukuran bank positif signifikan terhadap risiko kredit. Ukuran bank merupakan besar kecilnya bank yang dicerminkan melalui total aset dan kepemilikan modal sendiri Rajan &

Dhal, (2003). Semakin besarnya ukuran bank, volume kredit yang diberikan oleh bank juga akan semakin besar, maka risiko yang kredit yang dihadapi oleh bank juga akan semakin besar.

#### **4.3.4 Pengaruh Pendapatan Bersih Bagi Hasil terhadap risiko kredit**

Berdasarkan hasil hipotesis kelima menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan bagi hasil bersih yang menggunakan proxy NPSI terhadap risiko kredit yang menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar  $-0,174302$  dan nilai t hitung sebesar  $-3,245762 > t$  tabel sebesar  $1,66827$  dengan nilai signifikansi *probability*  $0,0019 < 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a5}$  diterima dan menolak  $H_{o5}$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan *Net Profit Share Income* (NPSI) terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Das & Ghosh, (2007) dan Afif & Mawardi, (2015). Artinya jika semakin besar pendapatan bersih bagi hasil maka risiko kredit Bank Umum Syariah akan semakin menurun. Hasil tersebut berkaitan dengan teori agensi dikarenakan teori ini menekankan pada perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang diberikan agar para manajer berperilaku positif atau menguntungkan perusahaan secara keseluruhan (Pugna & Duțescu, 2020). Penjelasan di atas di dukung oleh Pugna & Duțescu, (2020) yang menyatakan beberapa riset menemukan bahwa dengan teori agensi, kepemimpinan yang independen mempunyai kinerja perusahaan yang tinggi. Agen (manajemen perbankan) juga memberikan komitmen dan keprofesionalisan dalam upaya menyeleksi nasabah (principal) dengan baik sehingga pembiayaan yang disalurkan memperoleh return yang tinggi. Semakin tinggi kepastian return yang akan didapat oleh pihak bank maka akan menurunkan tingkat rasio NPF pada bank umum syariah di Indonesia (Mutamimah & Chasanah, 2012).

Hal ini diperkuat oleh Lassoued, (2018) yang menyatakan bahwa perbankan islam yang cukup baru dibandingkan dengan perbankan konvensional tidak bisa merusak reputasi umum sistem perbankan konvensional dan mampu menimbulkan kerugian. Perbankan islam memiliki sejarah operasional yang relatif baru dari pada lembaga perbankan konvensional, teknik manajemen risiko yang terbatas di lembaga perbankan islam bisa menjadi masalah lain untuk potensi risiko kredit yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi di karenakan perbankan islam tidak di izinkan menggunakan teknik berbasis hutang untuk mengurangi risiko kredit maupun instrumen spekulatif, termasuk credit default swaps, opsi dan futures. Dan pada umumnya perbankan syariah juga tidak memiliki akses ke agunan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya İncekara & Çetinkaya, (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan bersih bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Dikarenakan pendapatan bersih bagi hasil atau biasa dikenal dengan Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan margin/keuntungan bagi pihak bank. Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan- pembiayaan yang lainnya dalam pool dana pendapatan yang kemudian akan disalurkan menjadi aset perusahaan, investasi dan modal (Muhammad, 2004). Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh menandakan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah menjadi meningkat maka semakin tinggi pula tingkat risiko kredit yang akan terjadi. İncekara & Çetinkaya, (2019) menyatakan bahwa setiap peningkatan pendapatan bersih bagi hasil maka risiko kredit akan meningkat.

#### **4.3.5 Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap risiko kredit**

Berdasarkan hasil hipotesis keenam menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap risiko kredit yang

menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,543321 dan nilai t hitung sebesar  $0,166779 < t$  tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability*  $0,8681 > 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a6}$  ditolak dan menerima  $H_{o6}$ . Hal ini menunjukkan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah & Chasanah, (2012), Retnowati & Jayanto, (2020), dan Heny Purwaningtyas, (2020) yang menyatakan Jadi semakin tinggi pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) maka semakin tinggi tingkat risiko kredit di bank umum syariah, namun pengaruhnya tidak bermakna. Hal ini dikarenakan pada saat kondisi *Gross Domestic Product* (GDP) mengalami peningkatan maka pendapatan makroekonomi masyarakat juga ikut meningkat namun hal ini justru tidak menurunkan tingkat risiko kredit, dikarenakan ini mengindikasikan adanya kecenderungan dari masyarakat Indonesia yang dinilai sangat konsumtif jadi sebagian besar pendapatannya lebih diutamakan untuk kebutuhan konsumtif nya dari pada untuk membayar cicilan pinjaman ke perbankan (Mutamimah & Chasanah, 2012). Terbukti bahwa Menurut riset yang dilakukan oleh Nielsen saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-empat sebagai negara paling konsumtif di dunia setelah Filipina, India dan Vietnam (Annur, 2019).

Hal penting dalam teori agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik (Pugna & Duțescu, 2020). Tindakan-tindakan tersebut dibutuhkan saat terjadinya volatilitas ekonomi atau ketidakpastiaan kondisi ekonomi yang akan membahayakan kondisi perbankan. Talavera *et al.*, (2012) menyatakan bahwa bank menurunkan rasio pinjaman pada saat terjadi volatilitas ekonomi yang substansial, dikarenakan manajer bank melakukan penghindaran risiko bank yang lebih tinggi. Selain itu, bank kecil cenderung



tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan ekonomi makro dibandingkan dengan bank yang besar. Hasil ini terjadi sehubungan dengan ketidakpastian pengukuran makroekonomi yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya (Nugrohowati & Bimo, 2019) yang menyatakan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya GDP disebabkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi membuat pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga masyarakat bisa memenuhi kewajibannya dan resiko terjadinya kredit bermasalah akan mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa semua bidang usaha dalam kondisi baik yang ditandai dengan peningkatan produktivitas. Pada saat pertumbuhan mengalami kenaikan biasanya kegiatan usaha juga akan menguntungkan sehingga pendapatan yang diterima masyarakat meningkat (Ahmadi *et al.*, 2017). Sejalan dengan teori tersebut Firdaus, (2016) menyatakan bahwa konsumsi swasta yang diiringi dengan penurunan tingkat investasi dan penurunan PDB riil dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Sehingga hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil usaha yang digunakan untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima dari perbankan.

#### **4.3.6 Pengaruh Inflasi terhadap risiko kredit**

Berdasarkan hasil hipotesis ketujuh menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap risiko kredit yang menggunakan proxy *Non Performing Financing* (NPF). Hasil uji t pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,116156 dan nilai t hitung sebesar  $0,988656 < t$  tabel sebesar 1,66827 dengan nilai signifikansi *probability*  $0,3266 > 0,05$ . Maka jawaban hipotesis yaitu,  $H_{a7}$  ditolak dan menerima  $H_{o7}$ . Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati & Jayanto, (2020), Nuradila & Wibowo, (2018) dan İncekara & Çetinkaya, (2019). Hal ini menyatakan bahwa keterhubungan antara rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi pada Bank Umum Syariah memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan Bank Konvensional. Bank syariah menggunakan beberapa jenis kontrak yang lebih dalam pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan diversifikasi risiko kredit. Pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Dalam aplikasi murabahah, angsuran ditetapkan dari awal sampai akhir. Jadi bila terjadi peningkatan inflasi dalam jangka panjang, ini tidak mempengaruhi jumlah cicilan yang dibayarkan pelanggan. Karena nasabah dapat merencanakan pengaturan arus kas yang dibutuhkan untuk melunasi pembiayaan murabahah. demikianlah dampak risiko pembiayaan masih dapat dikendalikan Retnowati & Jayanto, (2020).

Teori agensi menjelaskan bahwa terjadi kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan (Pugna & Duțescu, 2020). Meskipun pertentangan sering terjadi, saat terjadinya kondisi yang tidak terduga seperti naik turunnya kondisi makro ekonomi seperti pergerakan inflasi yang tidak terduga manajer harus mempunyai cara untuk mengatasinya. Caglayan & Xu, (2016) berpendapat bahwa volatilitas inflasi akan membuat manajer bank bersikap lebih konservatif dalam menerbitkan kredit baru. Sebaliknya, ketika volatilitas inflasi rendah, manajer bank akan memiliki keleluasaan untuk meminjamkan lebih istimewa.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Hasanah & Septiarini, (2020) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Hal ini

menunjukkan bahwa pada bank syariah, meningkatnya inflasi tidak akan menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Inflasi juga membuat nilai jaminan tersebut mengalami kenaikan, sehingga dapat menutupi pembiayaan bermasalah apabila debitur gagal bayar (Hasanah & Septiarini, 2020).